LAMPIRAN

Berita tanggal 21 Agustus 2016

Berpaspor Filipina, 177 WNI Ditangkap

Manfaatkan Kuota untuk Berangkat Haji

MANILA - Sebanyak 177 warga negara Indonesia ditangkap petugas imigrasi Filipina karena kedapatan menggunakan paspor negara tersebut untuk menjalankan ibadah haji ke Arab Saudi. Otoritas Filipina berencana mendeportasi mereka.

Para WNI itu menggunakan paspor Filipina dan mengaku sebagai warga negara Filipina saat hendak bertolak ke Madinah dari Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA), Manila, Jumat (19/8) pagi. Mereka dijadwalkan menuju Arab Saudi dengan menggunakan pesawat Philipines Airlines.

Ketika proses wawancara di bagian imigrasi, mereka tidak bisa berbahasa lokal seperti Tagalog, Maranao, Cebuano, dan Maguindanao. Saat ditanya lebih lanjut, mereka mengaku sebagai WNI.

Media Filipina *The Philippine Star*, Sabtu (20/8), menyebutkan Komisioner Biro Imigrasi setempat, Jaime Morente, memerintahkan segera menjeratkan dakwaan pelanggaran aturan imigrasi terhadap para WNI tersebut.

Dakwaan itu antara lain pengakuan sebagai warga negara Filipina dan dakwaan menjadi pendatang asing yang tidak diinginkan. Para WNI itu, menurut *The Philippine Star*, ditahan di pusat penahanan imigrasi di Camp Bagong Diwa, Taguig City, pinggiran Manila.

"Otoritas Filipina terus berkoordinasi dengan KBRI di Manila untuk membantu proses identifikasi 177 WNI itu, agar selanjutnya bisa segera mendeportasi mereka ke Indonesia," kata Morente.

Morente mengungkapkan, pihaknya mulai menyelidiki sindikat pemalsu paspor setelah Presiden Rodrigo Duterte mengingatkan keberadaan warga asing yang memanfaatkan paspor Filipina untuk berangkat haji. Penggunaan paspor Filipina oleh warga asing itu, diyakini melibatkan pejabat korup yang menangani calon jamaah haji Filipina ke Makkah, Arab Saudi.

Dengan menggunakan paspor Filipina, para WNI itu memanfaatkan kuota haji milik Filipina untuk berangkat ke Tanah Suci. Paspor-paspor Filipina yang digunakan para WNI itu, sebut Morente, merupakan dokumen paspor asli, namun didapat secara ilegal.

(Bersambung hlm 9 kol 4)

Berpaspor...

(Sambungan hlm 1)

Berdasarkan informasi, para WNI membayar 6-10 ribu dolar AS (Rp 78 juta - Rp 131 juta) per orang, untuk mendapatkan paspor Filipina tersebut. Diduga kuat, paspor Filipina itu disediakan oleh lima warga Filipina yang mendampingi mereka. Kelima warga Filipina itu diyakini sebagai sindikat pemalsu paspor dan telah ditahan oleh Biro Investigasi Nasional (NBI) untuk diselidiki lebih lanjut.

Menjadi Turis

Para WNI itu diketahui tiba di Filipina secara terpisah sebagai turis, beberapa minggu sebelum jadwal keberangkatan ke Arab Saudi. Mereka menyatakan Jolo, Sulu, sebagai alamat sementara di Filipina. Sementara itu, KBRI di Manila menyatakan akan memberikan pendampingan kepada 177 WNI tersebut. "Kami sudah tangani sejak mendapat laporan dari Imigrasi Terminal 2 NAIA," kata Sekretaris Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila, Tody Baskoro.

KBRI, kata Tody, sudah berkoordinasi dengan instansi di Filipina dan Indonesia terkait kejadian ini. "KBRI telah dan akan terus memberikan pendampingan terhadap 177 orang yang diduga kuat adalah WNI," jelasnya.

Adapun Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, membenarkan adanya penangkapan 177 WNI di Bandara NAIA saat akan terbang ke Jeddah, Arab Saudi. "Pada tanggal 19 Agustus sekitar pukul 09.00 KBRI Manila dihubungi oleh imigrasi Bandara Internasional Manila yang memberitahukan adanya sejumlah penumpang Philippines Airlines jurusan Jeddah yang paspornya mencurigakan. Ternyata paspor Filipina mereka palsu, dan mereka itu WNI," kata Iqbal.

Saat ini, kata dia, para WNI tersebut masih diperiksa di detensi imigrasi Filipina. KBRI Manila telah berkoordinasi dengan otoritas imigrasi Filipina dan telah mengirimkan bantuan logistik kepada 177 WNI tersebut.

"KBRI juga telah berkomunikasi dengan beberapa ketua kelompok. Kami ingin agar bisa melacak modus sindikat tersebut merekrut WNI kita yang ingin naik haji. Maka Sabtu ini (kemarin) tim KBRI Manila bekerja sama dengan otoritas imigrasi Filipina melakukan wawancara dan pendalaman kasus dengan 177 orang tersebut," tandas Iqbal. (F4,dtc-94)

Berita tanggal 22 Agustus 2016

Daftar Tunggu Pemicu Pelanggaran Haji

Mayoritas dari Sulawesi Selatan

JAKARTA - Tertahannya 177 warga negara Indonesia (WNI) oleh pihak imigrasi Filipina untuk berangkat haji dipicu penuhnya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji Indonesia. Mereka memanfaatkan sisa kuota haji yang masih dimiliki Filipina sehingga memakai paspor negara tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, kemarin. "Kami upayakan bisa memulangkan mereka. Kami terus berkomunikasi dengan otoritas Filipina untuk menangani hal ini.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

AM Fachir

SM/www.kemlu.go.id

Daftar...

(Sambungan hlm 1)

Bisa jadi pelanggaran hukum ini terjadi karena masalah ketidaktahuan warga negara kita. Maklum, kuota kita itu sangat terbatas dibandingkan dengan minat. *Waiting list*-nya penuh, antrenya jadi sangat lama," kata Fachir disela acara pembukaan pameran foto 71 Tahun Kementerian Luar Negeri di Senayan City, kemarin.

Dihubungi terpisah Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfudin menduga kuat 177 WNI tersebut korban penipuan sindikat.

Menurut dia sulit bagi calon haji dengan sadar memaksakan diri menempuh cara-cara yang melanggar hukum, demi bisa cepat berangkat haji.

"Mereka (177 WNI) itu korban penipuan. Disampaikan oleh oknum, kepada mereka ini cara legal. Menurut saya jarang ada orang yang sadar, yang rela menghalalkan berbagai cara sampai rela melanggar hukum, hanya ingin naik haji lebih cepat. Itu kan hal-hal yang merusak ibadah haji," kata dia

Sementara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan WNI yang tertahan di Filipina tidak hanya berasal dari satu daerah. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Berasal dari berbagai daerah, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan," kata dia.

Sebanyak 177 WNI diamankan pihak imigrasi Filipina saat hendak terbang ke Madinah, Arab Saudi menggunakan pesawat Philippine Airlines (PAL) dengan nomor penerbangan PR 8969 di Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA), Manila, pada Jumat (19/8) dini hari. Mereka semua hendak menjalankan ibadah haji.

Pihak Imigrasi Filipina mendapati 177 calon jamaah haji itu bukan warga Filipina. Padahal mereka memegang paspor Filipina. Mereka didampingi oleh lima warga Filipina, yang diyakini sindikat pemalsu paspor dan penyelenggara haji untuk para WNI itu. Menurut lima warga Filipina itu, sudah tidak ada kuota haji tersisa bagi Indonesia.

Kepastian Yuridis

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia & Bantuan Hukum Indonesia (PWNI & BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu M Iqbal menyebutkan, 177 WNI mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan (lebih dari 50 persen). Selebihnya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, serta Lampung.

Mengenai identitas lengkap 177 WNI itu, Iqbal belum bisa membeberkan karena informasinya belum akurat. Yang jelas, kondisi WNI yang ditahan masih sehat. Proses verifikasi ke-177 WNI telah dilakukan oleh pihak Tim KBRI. "Mereka terdiri dari 100 perempuan dan 77 laki-laki," ucap Iqbal.

Kemenlu juga sedang melakukan pengecekan data melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Pengecekan itu untuk mendapatkan kepastian secara yuridis status kewarganegaraan ke-177 orang tersebut.

"KBRI telah memasok kebutuhan logistik harian para WNI, seperti, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian dan perlengkapan sanitasi. Selain itu KBRI Manila juga telah membentuk tim piket agar *on daily* basis bisa memantau keadaan seluruh 177 WNI di detensi imigrasi dan *stand by* selama 24/7 untuk merespons setiap perkembangan yang membutuhkan penanganan secara cepat," tutumya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil mengakui bahwa antrean berangkat haji saat ini cukup panjang.

Pemerintah tak punya kendali penuh untuk menjawab tingginya permintaan haji.

Seperti di Sulawesi Selatan antrean pemberangkatan haji sampai 31 tahun dan di Kalimantan Selatan 28 tahun. Namun demikian, fenomena antrean berhaji tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara tetangga antrean hajinya mencapai 50 tahun.

Antrean haji menurut Djamil tidak bisa dihindari karena terkait kapasitas Tanah Suci, Armina, dan Masjidil Haram yang terbatas.

Kalaulah saat ini Masjidil Haram diperluas, namun masalahnya adalah di Mina yang tidak diperluas karena batas-batasnya sudah ditentukan. (F4,dtc,ant-90)

Berita tanggal 23 Agustus 2016

Sindikat Penipu Calon Haji Dilacak

Kasus 177 WNI Berhaji Lewat Filipina

JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM bersama Polri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama melacak sindikat yang diduga menipu dan memalsukan dokumen 177 calon haji asal Indonesia yang berangkat melalui Filipina.

Hingga kemarin, ke-177 calon haji itu masih tertahan di negara tersebut karena diduga menggunakan dokumen palsu. Pemerintah terus mengupayakan pemulangan mereka ke Tanah Air.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menjelaskan, ada sindikat yang mengoordinasi 177 WNI itu. Jaringan tersebut tak hanya beroperasi di Filipina, tetapi juga di Indonesia.

"Jadi, ada yang identitasnya palsu. Sedang kami tangani. Mereka dikoordinasi oleh sindikat, baik dari Filipina maupun orang-orang kita di sini (Indonesia)," ujar Yasonna di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (22/8).

Berganti Paspor

Yasonna menambahkan, saat pergi ke Filipina, para WNI yang antara lain berasal dari Sulawesi, Jawa Tengah, dan Sumatera itu menggunakan paspor Indonesia. Namun, saat sampai disana, mereka berganti paspor dengan memalsukan surat keterangan menjadi warga negara Filipina.

Kemenkumham telah memulai pelacakan sindikat itu dengan mengadakan pemeriksaan internal, terutama di Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen keimigrasian.

SM/Antara

Yasonna Laoly

"Beberapa kantor imigrasi kami usut. Direktur Wasdakim (Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) dan Direktur Lintaskim (Lalu Lintas Keimigrasian) sudah ditugaskan (untuk mengusut-Red)," ungkap politikus PDIP ini.

Seperti diberitakan, 177 WNI diamankan imigrasi Filipina saat hendak terbang ke Madinah, Arab Saudi, menggunakan pesawat Philippine Airlines dengan nomor penerbangan PR 8969 di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, Jumat (19/8).

Petugas mendapati 177 calon haji itu bukan warga Filipina. Padahal, mereka memegang paspor Filipina.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Sindikat....

(Sambungan hlm 1)

Mereka didampingi lima warga Filipina, yang diduga anggota sindikat pemalsu paspor dan penyelenggara haji untuk para WNI. Ke-177 orang itu tiba di negara tetangga tersebut secara terpisah dan mengaku sebagai wisatawan, menjelang jadwal keberangkatan mereka ke Saudi.

Mereka berangkat dengan membayar 6 ribu dolar AS hingga 10 ribu dolar AS (sekitar Rp 80 juta-Rp 130 juta) per orang. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan ongkos naik haji (ONH) 2016 sebesar Rp 34 juta.

Kepala Bidang Humas Kemenag Rosidin Karidi, jika nanti diketahui bahwa biro haji dan travel yang dipakai 177 calon haji itu terdaftar atau memiliki izin, pihaknya akan menindak dengan tegas. Soal hukum pidana, Kemenag menyerahkan penuh kepada Polri.

"Kalau biro tersebut berizin atau terdaftar, bisa kami cabut. Tetapi, kalau ternyata tidak terdaftar, itu ranah kepolisian," ujarnya.

Rosidin mengimbau masyarakat waspada dan tidak termakan bujuk rayu hingga menempuh cara yang tidak benar saat hendak menunaikan ibadah haji.

Ketidaktahuan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengemukakan, pihaknya telah menghubungi Menlu Filipina untuk menangani persoalan ini sesuai dengan peraturan perundang-perundangan kedua negara.

Menurutnya, permasalahan yang menjerat 177 WNI tersebut kemungkinan terjadi karena ketidaktahuan dan keterbatasan kuota ibadah haji untuk Indonesia. Hal tersebut dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab dengan menawarkan berbagai kemudahan.

Pemulangan ke-177 WNI itu dipastikan memakan waktu karena menyangkut pelanggaran serius. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto mengatakan, pihaknya turut menelusuri kasus ini. Bareskrim berkoordinasi dengan Kemenag untuk menyelidiki keterlibatan agen dalam negeri yang memberangkatan mereka.

Pihaknya juga akan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang digunakan. "Kami akan kirim anggota ke sana untuk memeriksa mereka sebagai saksi korban," ujar Agus di Mabes Polri.

Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, kasus ini terjadi karena antrean haji yang sangat panjang. Sebaliknya, kuota di sejumlah negara lain banyak yang tidak terpenuhi sehingga mubazir. Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah agar melobi negara-negara tersebut untuk mengambil kuota haji yang tidak mereka manfaatkan.

Dia mencontohkan, Indonesia bisa mengambil 500 kuota yang tidak terpakai di Filipina. Ini lebih baik bagi masyarakat daripada memaksakan diri dan melanggar hukum karena menggunakan paspor palsu. "Jadi dengan cara itu, semua legal. Secara hukum agama, melaksanakan haji dengan memakai paspor palsu, tidak boleh," kata Hidayat. (F4,K24,di,viva,ant-59)

Berita tanggal 24 Agustus 2016

11 Calon Haji Jepara Juga Ditahan

Gunakan Paspor Filipina, Terancam Dipidana

JAKARTA - Dari 177 calon haji yang ditahan di Filipina, 11 di antaranya berasal dari Jepara. Mereka diduga menggunakan paspor palsu Filipina.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, 117 calon haji yang menggunakan paspor palsu Filipina itu berasal dari Sulawesi Selatan, Tangerang, Jepara, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, Riau, Jambi, dan Kalimantan Timur.

Mereka berangkat melalui agen perjalanan haji abal-abal karena tidak tercatat di Kementerian Agama.

"Pada umumnya, tidak tercatat memiliki izin usaha keberangkatan haji," ujar Boy di Mabes Polri, Selasa (23/8).

Mantan Kapolda Banten itu mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat dimulainya penyelidikan karena kasus sudah memenuhi unsur pidana, yakni pemalsuan dokumen.

Untuk penyelidikan perkara, Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan Filipina, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri.

Rencananya, Polri akan memeriksa pengurus tujuh agen perjalanan abal-abal yang memberangkatkan para calon haji tersebut.

"Penyidik berusaha mencari orang-orang yang terlibat di masing-masing daerah," tandasnya.

Ada nama-nama yang telah dikantongi pihak kepolisian. Dia juga mengatakan, penyelidikan itu dimulai dari proses administrasi badan usaha agen perjalanan haji.

Boy Rafli Amar

(Bersambung hlm 5 kol 1)

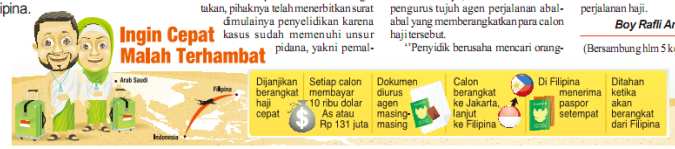

11 Calon....

(Sambungan hlm 1)

Selanjutnya, penyelidik akan mendalami proses pembuatan paspor para calon haji yang diduga palsu. Boy mengatakan, para calon haji tersebut, masing-masing dikenai ongkos naik haji 8 ribu-10 ribu dolar oleh agen perjalanan.

Dia mengatakan, agen perjalanan diduga menggunakan kuota haji Filipina yang longgar. Sebab, jika menggunakan kuota haji Indonesia, harus antre lama.

Terancam Pidana

Selain membidik agen perjalanan, para calon haji juga bisa terjerat pidana bila terbukti dengan sadar dan sengaja memalsukan paspor Filipina.

''Kalau tahu dan sengaja menggunakan paspor palsu, sama-sama bisa kena. Namun jika tidak tahu, yang penting bisa ke Makkah, ya korban penipuan,'' kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat.

Dia juga mengungkapkan, para calon sudah dimintai keterangan di Filipina. Namun Tito menyatakan belum mendapat laporan hasil pemeriksaan di Filipina.

''Sudah diperiksa di kedutaan. Sudah dapat sejumlah nama agen. Tidak kami sebutkan dulu karena masih penyidikan. Saya belum tahu (hasil pemeriksaan 177 WNI), mereka baru menjelaskan ditawari untuk berangkat cepat, karena kuota terbatas dan mengambil kuota Filipina. Sampai di sana, dapat paspor Filipina,'' jelasnya.

Saat ini, lanjut Tito, polisi masih fokus menyelidiki para agen perjalanan yang memberangkatkan para calon. Tito juga menyebutkan, ada warga Malaysia yang terlibat dalam jaringan ini.

Di sisi lain, para calon haji yang tertahan di Filipina dipastikan gagal berangkat ke tanah suci. Menlu Retno LP Marsudi menyatakan akan segera memulangkan mereka dari Filipina, begitu selesai verifikasi.

''Proses verifikasi masih terus dilakukan. Begitu selesai maka akan segera diurus proses pemulangan,'' ungkap Menlu melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta. (K24,di,dtc-61)

Berita tanggal 25 Agustus 2016

"Haji Filipina" Tahun Lalu Lolos

Tujuh Agen Perjalanan Diselidiki

JEPARA - Perekrutan "haji Filipina" di Jepara ternyata sudah berlangsung setahun lalu. Dari 177 calon haji yang ditangkap oleh Filipina, 19 orang rombongan dari Jepara. Tahun lalu, ada rombingan dari Jepara yang lolos naik haji lewat Filipina.

Aksi sindikat biro haji telah bergerilya dengan mendatangi rumah per rumah menawari warga Jepara untk naik haji melalui Filipina.

Dituturkan Ahmad, dia mengaku ditawari naik haji oleh sebuah biro perjalanan di Demak berbiaya Rp 120 juta pada 2014. "Bahkan sebelum Puasa tahun ini juga ada biro lain yang menawari, biayanya Rp 140 juta langsung naik haji," kata warga Jepara itu.

Kedua biro yang menawari berhaji lewat Filipina sama-sama menjanjikan pelayanan plus dengan durasi pelaksanaan di Tanah Suci selama 20 hari.

(Bersambung hlm 7 kol 3)

"Haji...

(Sambungan Hal 1)

Kedua biro itu, lanjutnya, berkantor di Semarang. Kini, lanjutnya, di Jepara juga telah banyak kantor biro mengklaim sebagai penyelengara ibadah haji khusus (PIHK).

Penawaran terbaru dari biro yang sama tapi lewat Malaysia untuk keberangkatan 2021. Biaya dibayar dimuka sebesar Rp 53 juta. Sisanya dibayar tahap berikutnya. "Uangnya diputar-putar dulu. Katanya sudah ada 25 orang yang mendaftar. Kata yang menawari saya, pemiliknya punya koneksi kementerian agama Malaysia," ungkapnya.

Di Jakarta Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya tengah menggali profil tujuh agen perjalanan haji yang memberangkatkan 177 calon haji Indonesia di antarnya dari Jepara. Hingga kemarin, Bareskrim belum mendapatkan data konkret pengurus dan profil tujuh agen perjalanan tersebut. Mereka masih dalam penyelidikan.

Boy mengatakan, belum bisa memastikan kapan mereka yang masih berada di Filipina kembali ke Tanah Air. Sebab, mereka tengah menjalani proses hukum di Filipina. Kemungkinan mereka akan dideportasi dari Filipina.

"Kami belum menentukan tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi korban ini yang kami sampaikan tadi akan dilaksanakan di Filipina," ujar Boy di Mabes Polri.

Boy mengatakan, tim penyelidik sudah minta keterangan terhadap 177 jamaah haji tentang kronologis keberangkatan mereka ke Tanah Suci melalui Filipina.

Sementara pemilik biro jasa pemberangkatan jamaah haji dari Jepara, PT Fadlu Robbi Muhammad Shoheh menyatakan ada 19 orang yang masuk data istrinya, Sugipah Zahroh. Sugipah dan anaknya, Ahmad Muhyidin Shoheh juga turut ditahan lantaran menjadi pendamping para calon haji itu.

"Ada 14 orang dari Jepara, termasuk istri dan anak saja. Ada juga dari dua dari Bojonegoro, dua dari Grobogan, serta satu lagi dari Semarang," terang dia saat ditemui di kantornya di Jepara, Rabu (24/8).

Mereka tersebar dari seluruh Jepara. Bahkan ada pula satu orang dari Pulau Karimunjawa, bernama Sutijah Tasripan Kimun. Adapun warga luar Jepara yang ikut rombongan tersebut yakni Norcholis Achmadi Kartubi (Semarang), pasangan suami istri Susilo Jaman Morodjoyo dan Murni Tomo Torejo Saliyo (Grobogan) serta pasangan Kaswan Rasiban Djoyo dan Siti Nur Asiyah Moh Zaini (Bojonegoro).

Meski istri dan anaknya ikut rombongan, lanjut Shoheh, pemberangkatan belasan warga itu tidak ada kaitan dengan biro jasa yang dikelolanya itu.

"Kasus tersebut murni koordinasi yang dilakukan secara pribadi oleh istri saya, yang kebetulan kenal dengan pengelola biro perjalanan Ramana Tour di Jakarta. Namanya (dari Ramana Tour - red) Pak Andi. Istri saya berposisi sebagai pendamping warga yang ingin berangkat haji melalui Filipina. Biro di Jakarta itu berkordinasi dengan Syeh Rasyidi di Filipina. Tidak ada kaitan dengan biro milik saya. Bahkan saat pemberangkatan mobil travel saya tidak saya ijinkan untuk berangkat," ungkapnya.

Dia menceritakan, segala urusan administrasi dilakukan sendiri oleh calon haji dengan istrinya. Mulai dari mengurus paspor hingga pembayaran sebesar Rp 120 juta ke Ramana Tour dilakukan sendiri oleh calon jamaah. Istrinya hanya mengirimkan data berupa nomor telepon dan fotokopi E-KTP.

Perlakuan Baik

Shoheh lantas bertutur, awal pemberangkatan sekitar Mei lalu menuju Filipina menggunakan paspor WNI dan visa wisata untuk pengurusan paspor Filipina. Paspor itu untuk menjadikan status jamaah haji sebagai warga negara Filipina guna syarat untuk pemberangkatan haji ke Arab Saudi menggunakan kuota Filipina. "Mereka ditahan di pos pemeriksaan dokumen. Padahal tas dan barang-barang lainnya sudah masuk ke bagasi pesawat," tuturnya.

Shoheh juga menegaskan, istrinya telah meminta pertanggungjawaban dari Ramana Tour. Uang yang sudah dibayarkan diminta agar dikembalikan. Ia pun mengaku tidak mengetahui jika cara yang dilakukan pihak Ramana Tour melanggar hukum. "Tahun lalu sukses memberangkatkan jamaah haji," ucapnya.

Dari hasil komunikasi dengan istrinya pada Rabu (24/8) pagi, pihak KJRI, Kemenlu dan Polri sudah datang mengunjungi para calon jamaah haji dan sekaligus meminta keterangan. Didapati informasi pula jika para WNI itu mendapatkan perlakukan yang baik.

Terpisah, salah seorang perangkat Desa Mulyoharjo, Solekan mengaku sudah menerima informasi jika ada enam warganya yang ikut ditahan di Filipina. Diakui pula pemberangkatan haji melalui negara tetangga itu sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Sementara itu, beberapa keluarga calon jamaah haji yang ditahan asal Desa Mulyoharjo saat ditemui menampakkan wajah yang gelisah dan khawatir. Tapi kesemuanya menolak berkomentar. "*Mboten mas, mboten*," kata pihak keluarga.

Ketua Komisi C DPRD Jepara, Sunarto berharap ini menjadi pelajaran semua pihak. Mulai dari masyarat, biro perjalanan dan Pemkab Jepara agar lebih berhati-hati. Sebab menyangkut lintas negara.

Terpisah, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jateng Bambang Sumardiono mengatakan, dari 19 orang itu, 14 orang asal Jepara. "Kami sudah mengecek, semua dokumen, termasuk paspor sudah sesuai persyaratan. Jadi bukan paspor dari Indonesianya yang palsu, kalau pakai paspor Indonesia ya tentu tidak akan ada masalah," kata Bambang kepada *Suara Merdeka*, Rabu (24/8).

Paspor ke 19 orang itu resmi diterbitkan kantor keimigrasian.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng, Noor Badi mengungkapkan, selama ini tidak ada laporan dari masyarakat terkait keberadaan penawaran haji nonkuota seperti pada kasus di Filipina.

"Banyak sekali biro perjalanan yang beroperasi tanpa izin dari kami di sini. Mereka cabang, tapi tidak memiliki keabsahan. Masyarakat agar berhati-hati dan menghindari penawaran langsung naik haji. Itu berpotensi penipuan. Naik haji di Jateng, itu ada daftar tunggu. Harus sabar," imbuhnya.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, koordinasi dengan bagian Imigrasi, Kementerian Agama masih dilakukan.

Pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait perusahaan jasa perjalanan atau travel yang memberangkatkan calon haji asal Jateng tersebut. (K24,-

Berita tanggal 26 Agustus 2016

Rombongan "Haji Filipina" Dibebaskan

JAKARTA - Sebanyak 177 calon haji yang ditangkap otoritas Filipina kini sudah dipindahkan ke Kedutaan BesarRepublik Indonesia (KBRI) di Manila. Selama lima hari mereka berada di pusat penahanan imigrasi.

Kepastian pemindahan ke KBRI disampaikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnivian saat berada di Gedung Kompolnas, Kamis (25/8). Tim Bareskrim Mabes Polri yang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas Filipina memeriksa rombongan "haji Filipina" di kedutaan. "Sudah tak lagi ditempatkan di rumah tahanan kepolisian, tapi sudah dipindahkan ke kedutaan di Filipina. Mereka di sana sambil menunggu verifikasi data mereka bahwa betul-betul mereka adalah warga negara Indonesia," kata Tito.

Mantan Kapolda Papua itu mengatakan, kemungkinan mereka baru bisa dipulangkan ke Tanah Air setelah selesai verifikasi identitas. "Deportasi kemungkinan besar. Kami dapat suratnya mekanismenya kemungkinan besar deportasi."

SM/dok

Tito Karnavian

Sambil menunggu pemeriksaan dan pemulangan para calon jamaah haji, Bareskrim Polri menyidik tindak pidana terhadap para pemilik agen perjalanan yangmemberangkatkan mereka. Diketahui, sebanyak tujuh agen perjalanan tersebut tidak memiliki izin resmi untuk pemberangkatan haji. Adapun ketujuh agensi yang memberangkatkan para WNI itu adalah PT Taskiah,

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Rombongan...

(Sambungan Hal 1)

PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Shafwa Makassar,Travel Hade ElBarde, KBIH Arafah, KBIH Arafah Pandaan.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, 177 calon haji Indonesia adalah korban dari sindikat kejahatan.

Dari laporan yang diterima Retno dari Kedubes RI di Manila, kasus yang menimpa mereka itu bukan pertama kali terjadi.

Juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir mengatakan, sekarang ini pemerintah Filipina sedang membahas mengenai kemungkinan para WNI yang akan dideportasi. "Kami harapkan dalam waktu 1 sampai 2 hari sudah dapat jawaban. Hari ini, pihak Filipina akan lakukan sidang kabinet terkait WNI bisa dipulangkan atau tidak," tuturdia.

Sementara itu, proses pemeriksaan masih akan terus dilakukan. Menurut Arrmanatha, proses ini termasuk untuk memverifikasi status WNI melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Tidak Disumpah

Sementara, pemerintah akan bersikap lunak terkait status kewarganegaraan 177 "haji Filipina" yang telah memiliki paspor negara tersebut meski palsu. Mengacu UU Kewarganegaraan, kedapatan membawa paspor negaralain atas namanya terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Haris, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan memberikan semacam toleransi kepada mereka walaupun telah melanggar Pasal 23 H UU tersebut. "Kami tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan, dan pemakluman yang membuat kewarganegaraan mereka tak harus dibatalkan," kata Freddy.

Menurut dia, para calon haji tersebut diduga kuat merupakan korban penipuan, dan juga tidak mengetahui konsekuensi bisa sampai kehilangan kewarganegaraan dengan mempunyai paspor negara asing atas namanya. Kondisi ini menurut dia, bisa mendapatkan pemakluman.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, kasus calon haji jelas berbeda dengan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Hikmahanto menduga kuat tidak terjadi pengambilan sumpah ke 177 WNI saat menjadi warga negara Flipina, mengingat paspor mereka adalah paspor palsu.

Pemerintah harus menjamin kewarganegaraan ke 177 WNI tersebut tidak hilang, karena ini adalah kasus penipuan yang sistematis melibatkan sindikat.

Dituturkan Musyafak anak Karomisah (63), warga RT 4 RW 1, Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Jepara, yang menjadi anggota keluarga dari 177 "haji Filipina", setelah menyelesaikan proses administrasi termasuk mengurus paspor dan visa wisata dengan tujuan Filipina, pada Rabu (17/8), berangkat menuju Bandara Ahmad Yani.

Setelah itu, satu rombongan berangkat bersama-sama menuju Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta)dan selanjutnya terbang ke Filipina. "Di Filipina, rombongan bertemu dengan pengelola biro di Filipina untuk menukar paspor dan visa wisata dengan paspor warga negara Filipina. Diberikan pula sejumlah perlengkapan ibadah haji," ucapnya.(K24,F4,di,ant-90)

Berita tanggal 27 Agustus 2016

177 Calon Haji Masih WNI

Polri Lacak Jaringan Internasional

JAKARTA - Sebanyak 177 calon haji asal Indonesia yang tertahan di Filipina masih berstatus WNI. Mereka tidak akan kehilangan kewarganegaraan. Kepastian itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (26/8).

"Saya tegaskan, mereka ini korban penipuan. Pasti tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur, yang kehilangan (kewarganegaraan) adalah mereka yang ingin, yang serius mengurus sesuai prosedur. Ini kan ditipu. Beda sekali antara yang memang ingin jadi warga negara asing dan yang ditipu," kata JK di Kantor Wakil Presiden.

Menurut Wapres, keinginan 177 WNI tersebut hanya ingin bisa cepat naik haji. Namun, penantian mereka akan masa tunggu haji di Indonesia yang sangat lama dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Sasaran pelaku adalah calon haji berpendidikan rendah. "Niatnya kan bukan jadi warga negara Filipina. Niatnya naik haji. Mereka orang kampung, mana tahu itu paspor. Dia pikir surat jalan saja. Saya dapat laporan dari dubes (di Filipina), ada (calon haji) yang buta huruf," paparnya.

Ia menegaskan, kasus ini berbeda dari yang dialami mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dan anggota Paskibraka Gloria Natapradja.

"Gloria masih di bawah usia 18 tahun, sedangkan Arcandra keluar (pindah kewarganegaraan) karena memang sesuai dengan UU itu."

(Bersambung hlm 7 kol 2)

Jusuf Kalla

SMidok

177 Calon....

(Sambungan hlm 1)

Wakil Duta Besar RI untuk Filipina Ade Petranto mengatakan, 177 orang tersebut belum bisa dipulangkan ke Tanah Air sampai akhir Agustus ini, karena masih ada proses yang harus dilalui. ''Besar kemungkinan setelah Agustus baru bisa pulang," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan, 139 dari 177 WNI sudah diserahkan ke KBRI Manila karena mereka dianggap sebagai korban.

Sisanya masih diperiksa oleh otoritas Filipina terkait pengusutan kasus pemalsuan dokumen untuk ibadah haji.

Wiranto juga memastikan ke-177 calon haji itu murni korban penipuan oleh agen-agen pemberangkatan haji.

"Mereka betul-betul tidak tahu menahu, tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan penipuan. Yang menipu kan agen-agen itu," ujarnya.

Tak Berizin

Sementara itu, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah membidik jaringan internasional dalam kasus "haji Filipina". Diduga ada keterlibatan warga asing dalam kasus ini.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, penyidik telah menemukan keterlibatan warga asing tersebut. Dia menjelaskan, pihaknya dapat menjerat warga asing itu dengan asas teritorial.

"Artinya, siapa pun, warga negara manapun yang ada di wilayah Indonesia bisa dikenai hukum pidana. Kalau ternyata pelaku adalah warga asing dan dia melakukan di luar negeri, tentu tidak dapat dikenai pidana kita," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menyelidiki keterlibatan warga asing itu pihaknya akan memintai keterangan para saksi korban, yakni ke-117 calon haji. Kendati demikian, Tito tidak menjelaskan detail jaringan internasional yang dimaksud.

"Tim sedang bekerja. Nanti kalau sudah berhasil, kami sampaikan kepada publik."

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, beberapa penyedia layanan haji yang memberangkatkan 177 WNI tersebut tidak mengantongi izin dari Kementerian Agama.

Polisi belum dapat memastikan apakah tujuh agen perjalanan yang terlibat merupakan bagian dari sindikat kejahatan terorganisasi. (F4,K24-59)

Berita tanggal 28 Agustus 2016

Pejabat Kemenag Diselidiki

SM/dok

"Haji Filipina" Didampingi Intensif

JAKARTA -Ada dugaan salah satu agen travel yang memberangkatkan 177 ''Haji Filipina" merupakan kerabat pejabat Kementerian Agama.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pihaknya menyelidiki masalah itu untuk memastikan ada atau tidak keterlibatan jajarannya.

"Muncul berita ada dugaan pegawai di Kementerian Agama di daerah yang ikut membantu proses itu. Karena itu, kami verifikasi, identifikasi, dan selidiki," ujar Lukman, Jumat (26/8).

Penyelidikan itu untuk mengungkap apakah yang bersangkutan betul-betul pegawai Kementerian Agama atau tidak. ''Yang kami khawatirkan, mereka mengaku-ngaku saja untuk penipuan," tandasnya.

Kemenag juga telah menurunkan tim investigasi untuk mengumpulkan data agen travel yang memberangkatkan ''Haji Filipina". Dia berharap, dalam waktu dekat sudah mendapatkan data akurat.

(Bersambung hlm 9 kol 1)

Pejabat....

(Sambungan hlm 1)

''Kami sudah memiliki tim yang akan diturunkan ke daerah, selain ke Filipina tentunya. Mereka mencari data-data akurat. Jadi tunggu dua-tiga hari ke depan, sampai kami memiliki data yang benar-benar valid," lanjutnya.

Menag juga memastikan, ke delapan biro perjalanan yang memberangkatkan ''Haji Filipina" adalah ilegal.

''Informasi yang kami terima, sejauh ini tidak ada satu pun di antara mereka yang memiliki izin resmi sebagai biro travel perjalanan, baik umrah apalagi haji. Karena itu, Kemenag tidak dalam posisi untuk memberikan sanksi karena mereka ilegal. Mungkin aparat penegak hukum yang akan menangani. Sebab, ini sudah masuk ranah pidana," tandas Lukman.

Terkait biro perjalanan yang memberangkatkan ''Haji Filipina", Bareskrim Polri sudah memintai keterangan tiga koordinator travel. Polisi sudah mengantongi delapan travel.

''Ada tiga koordinator dari delapan biro perjalanan haji yang diduga memberangkatkan WNI dari Indonesia sudah dimintai keterangan. Tapi kita belum bisa memastikan apakah mereka ini koordinator yang bertanggung jawab atas WNI ini atau sebagai korban juga," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar.

Agen travel yang memberangkatkan haji itu diketahui ilegal alias tidak terdaftar di Kemenag. Namun penyidik Bareskrim Polri belum bisa menetapkan apakah mereka melakukan pelanggaran hukum berupa penipuan.

"Pemeriksaan terus dilakukan, namun hasilnya belum bisa saya sampaikan. Tentunya kami berharap, para WNI cepat dipulangkan, agar bisa membantu penyelidikan," ungkapnya.

Di sisi lain, Kemenag akan memberikan pendampingan secara intensif terhadap 177 calon haji setelah dipulangkan dari Filipina ke Tanah Air, seperti pendampingan secara psikologis dan keagamaan.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ahda Barori menerangkan, pihaknya terus memantau perkembangan di Filipina. Apalagi 138 dari 177 calon haji sudah dibebaskan dari rumah detensi imigrasi Filipina dan dipindahkan ke Kedutaan Republik Indonesia di Manila.

"Mereka itu korban sehingga butuh pendampingan psikologis dan keagamaan," ujarnya di Asrama Haji Donohudan, Sabtu (27/8).

Masih Diperiksa

Menurut Ahda, 39 calon haji masih diperiksa pihak imigrasi Filipina. Dia berharap, pemeriksaan segera tuntas sehingga bisa bergabung bersama yang lain di Kedutaan Republik Indonesia di Manila. Namun terkait jadwal pemulangan mereka ke Tanah Air, belum bisa dipastikan.

Soal pendampingan, menurutnya, sudah diberikan sejak pertama ditangkap di Filipina karena dugaan paspor palsu. Setelah pulang ke kampung halaman di sejumlah daerah di Indonesia, pendampingan akan diberikan secara intensif. Terlebih, bisa dipastikan kondisi psikologis korban terguncang.

"Mereka dibujuk rayu travel. Bahkan ada yang menyerahkan Rp 400 juta untuk dua orang karena begitu ingin naik haji. Ini kami dampingi serius," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) HM Samidin Nasir mengatakan, jika aparat terkait di Indonesia berpikir seperti pemadam kebakaran, masalah itu bisa dicegah.

''Yang kami sayangkan, aparat hanya menunggu laporan. Tidak ada upaya pencegahan," kata Nasir, kemarin.

Menurut dia, kasus calon haji Indonesia berangkat lewat berbagai cara di luar aturan resmi itu sudah sering terjadi. Salah satu penyebabnya, peran biro perjalanan haji ilegal.

''Kita sudah sering kali mendengar calon haji nonkuota terlantar, mulai di TanahAir, tidak bisaberangkat, bahkan terlantar di Arab Saudi. Ini karena peran travel tak berizin. Karena itu, aparat terkait harus lebih jeli mendeteksi sepak terjang mereka. Para calo-calo, para kaki tangan mereka tentu aktif bergerak ke pelosok-pelosok mencari mangsa," kata pria asal Kebumen tersebut.

Mereka tentu memanfaatkan kondisi calon haji yang belum melek informasi atau khawatir tidak bisa berangkat karena meninggal dunia akibat masa tunggu sangat lama.

''Celah seperti ini harus diantisipasi pemerintah. Bisa dilakukan sosialisasi dan deteksi antisipasi dini. Dengan demikian, calon haji kita tidak jadi sasaran empuk mereka. Jika sudah seperti kejadian di Filipina, pemerintah juga repot. Kasus itu juga memalukan bangsa kita," kata dia. (F4,H80,dtc-61)

Berita tanggal 29 Agustus 2016

177 WNI Aman di KBRI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya berhasil memindahkan 177 WNI yang diduga menggunakan paspor palsu untuk melakukan ibadah haji dari tahanan imigrasi Filipina ke Kedutaan Besar RI di Manila.

Dalam pemindahan kedua ini, petugas membawa 39 WNI. Sebelumnya, Kemenlu telah memindahkan 138 WNI.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan, seluruh WNI yang tertangkap oleh imigrasi Bandara Internasional Manila itu dalam keadaan baik.

Pemindahan dilakukan setelah KBRI mendesak Kementerian Kehakiman Filipina untuk memberikan izin, dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang lebih memadai di KBRI.

"Kondisi 177 WNI secara umum baik. Tim KBRI bersama tim Kemenlu akan menangani mereka selama berada di KBRI," kata Ade Petranto, Wakil Duta Besar RI di Manila.

Sementara itu, tim penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah meminta keterangan sejumlah pihak, baik dari pihak travel haji dan koordinator pemberangkatan 177 calon haji Indonesia, yang berangkat menggunakan kuota Filipina.

"Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar, kemarin.

Namun, Boy enggan memerinci, siapa calon tersangka itu. Ia menegaskan, nama calon tersangka sudah dikantongi penyidik. Pada waktunya akan diumumkan.

Perketat Pengawasan

Pemerintah diminta memperketat pengawasan dan pengeluaran izin kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), menyusul penahanan 177 WNI di Filipina. KBIH yang bersangkutan harus dikenai sanksi pidana karena melanggar hukum.

Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng Ali Mansur HD, para calhaj tersebut merupakan korban, karena mereka mendaftar secara reguler dan memenuhi administrasi pada KBIH. Mereka dimanfaatkan oleh lembaga yang tidak bertanggung jawab.

"Izin biro travel itu harus dicabut, harus dipidanakan karena menipu," tuturnya.

Seperti diketahui, dari 177 calhaj yang ditahan di Filipina, 19 berasal dari Jateng, yakni 11 dari Jepara, lima dari Kota Semarang, dan tiga dari Pati. (J8,H81, cnn,viva-59)

Berita tanggal 30 Agustus 2016

Kepolisian Filipina Tetapkan Lima Tersangka

Kasus Haji via Manila

JAKARTA - Kepolisian Filipina telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus pemberangkatan 177 calon haji Indonesia via Manila. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (KaroPenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto. Meski demikian, Agus tidak menyebutkan identitas lima tersangka tersebut.

Agus juga mengungkapkan, dua warga Filipina R dan A diduga menjadi koordinator delapan agen perjalanaan yang memberangkatkan para calon haji tersebut. Pengelola PT W, agen perjalanan di Filipina itu, juga diduga sebagai pihak yang membantu mengurus pembuatan paspor Filipina.

Keduanya juga telah diserahkan ke Kepolisian Filipina. Namun Agus belum bisa memastikan apakah keduanya menjadi bagian dari lima orang tersangkatersebut.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Agus Rianto

Kepolisian...

(Sambungan hlm 1)

"Apakah dia (R dan A) sudah menjadi tersangka atau belum, nanti saya cek," ujarnya di Mabes Polri, Senin (29/8).

Agus menegaskan, 177 calon haji Indonesia yang berangkat lewat Filipina itu menggunakan paspor asli Indonesia. Namun saat akan berangkat lewat Filipina, menggunakan identitas pendukung (paspor Filipina) yang diduga palsu.

Polri juga telah memeriksa 25 saksi, termasuk calon haji yang telah berada di Filipina dan pengurus agen perjalanan di Tanah Air. Meski demikian, Bareskrim Polri belum menetapkan satu pun tersangka.

Korban Penipuan

Sementara itu, Mulyono, adik suami-istri Susilo dan Murni yang ditahan di Filipina mengatakan, keduanya merupakan korban penipuan. Kedua warga Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan itu tergiur agen travel di Jepara yang menawarkan ibadah haji tanpa menunggu puluhan tahun dengan memanfaatkan kuota Filipina. Keduanya juga harus membayar Rp 120 juta/orang atau Rp 240 juta. Namun ternyata, Susilo harus berurusan dengan petugas imigrasi Filipina. Karena itu, keluarga Susilo dan Murni berharap, keduanya dapat segera dipulangkan.

"Bagaimanapun mereka hanya korban kejahatan pihak travel. Masa korban penipuan malah ditangkap. Sudah kehilangan uang, malah ditangkap," ujarnya.

Terkait kejadian tersebut, Pemerintah diminta memperketat pengawasan dan pengeluaran izin kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). KBIH yang bersangkutan harus dikenakan sanksi pidana karena melanggar hukum.

Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng Ali Mansur HD, para calon haji merupakan korban. Mereka yang ditahan itu sebelumnya mendaftar secara reguler dan memenuhi administrasi kepada KBIH. Mereka dimanfaatkan oleh lembaga yang tidak bertanggung jawab. "Izin biro-biro travel itu harus dicabut. Juga harus pada ranah hukum dipidanakan karena melakuan penipuan," tuturnya.

Karena itu, pengawasan terhadap KBIH harus terus dilakukanagra kejadian seperti ini tak terulang kembali. Perizinan harus diperketat agar performa pelayanan haji tidak menurun. "Masyarakat juga sebaiknya banyak mencariinformasiagar tidak dirugikan," paparnya.

Seperti diketahui, dari 158 calon yang ditahan di Filipina, 19 di antaranya dari Jateng, yakni 11 dari Jepara, lima dari Semarang/Grobogan, dan tiga dari Pati.

Ali yang pernah menjadi Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) Jateng pada 2015, mengatakan pernah menemui warga Indonesia asal Sulawesi yang mengenakan seragam dan bendera Filipina. "Hal seperti ini sepertinya sudah berlangsung lama. Namun baru tahun ini ketahuan karena jumlah yang diberangkatkan mencapai 177 orang," tandasnya.

Dalam mengantisipasi antrean panjang, lanjutnya, pemerintah seharusnya mengajukan penambahan kuota. Penambahan kuota kepada Kerajaan Saudi Arabia diajukan berdasar kuota yang semestinya diterima warga Indonesia.

Semula kuota Indonesia 235.000 orang. Namun saat renovasi Masjidil Haram dikurangi menjadi 165.000 orang. Jika dihitung berdasar indeks rasio(IR) per 1.000 penduduk, calon haji yang bisa berangkat mencapai 250.000 orang.

"Pembangunan sudah selesai, seharusnya nambah kuota lagi. Lamanya waktu tunggu sampai 17 bahkan 20 tahun bisa menyebabkan penipuan karena banyak warga yang tidak sabar ingin naik haji," ujar Sekretaris Komisi A tersebut. (K24,zul,J8,H81-61)

Berita tanggal 31 Agustus 2016

Penetapan Tersangka setelah 177 WNI Pulang

SM/dok

Wiranto

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal Polri fokus memulangkan 177 calon haji Indonesia yang tertahan di Filipina ke Tanah Air.

Gelar perkara dan penetapan tersangka akan dilakukan setelah pemulangan mereka tuntas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto mengatakan, Bareskrim tidak ingin terburu-buru menetapkan tersangka dalam kasus ini, karena dikhawatirkan membuat para calon haji tersebut resah.

Hal itu dilakukan meskipun kepolisian Filipina telah menetapkan lima tersangka. "Prediksi calon (tersangka) itu sudah ada," ujar Agus di Mabes Polri, Selasa (30/8).

Dia mengatakan, penyidikan terus berjalan. Penyidik telah memeriksa 56 saksi, termasuk pengelola agen perjalanan, di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Filipina.

Menurutnya, Bareskrim memfokuskan penyidikan terhadap penanggung jawab keberangkatan 177 calhaj.

"Intinya, yang berkaitan dengan mereka yang memesan tiket dan yang menerima uang dari korban masih kami cari. Pasti ada penanggungjawabnya."

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menjelaskan, pemulangan ke-177 WNI akan dilakukan dalam hitungan hari.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Penetapan....

(Sambungan hlm 1)

Menurutnya, pemeriksaan mereka sudah selesai. "Seluruh calon haji Indonesia sudah kumpul di KBRI, tinggal pemulangan. Pemeriksaan terhadap mereka oleh aparat Filipina sudah selesai. Tinggal hitungan hari," kata Wiranto di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, 39 orang dari 177 calon haji yang diduga terlibat kasus itu diperiksa intensif aparat Filipina. Namun, 39 orang tersebut tidak dijadikan tersangka. "Mereka diperiksa sebagai saksi," ujarnya.

Wiranto menegaskan, para calhaj itu ditipu oleh agen perjalanan yang berencana memberangkatkan mereka ke Jeddah, Arab Saudi. Agen memalsukan identitas mereka untuk membuat paspor Filipina. Pemalsuan ini diduga melibatkan sindikat.

"Jadi, 39 WNI itu diperiksa karena pihak Filipina ingin mengusut sindikat tersebut," kata Wiranto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pemulangan 177 WNI tergantung seberapa cepat pendalaman dan pencarian informasi oleh Filipina. KBRI Manila ingin memastikan semua informasi yang diperlukan sudah diperoleh Filipina dari jamaah.

Jangan sampai terjadi, 177 WNI sudah pulang, namun ternyata Filipina belum cukup menggali keterangan dari mereka.

Kuota Negara Lain

Sejumlah kalangan menganggap kasus "haji Filipina" dipicu antrean panjang calon haji di Indonesia. Antrean bahkan mencapai 39 tahun ke depan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengincar kuota negara lain.

"Hanya, memang persoalannya tidak sederhana. Contoh, kuota Iran. Sejak beberapa bulan lalu, kami sudah mengetahui kecenderungan kuat Iran tidak akan berhaji tahun ini," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ia menjelaskan, permintaan pengalihan kuota dari negara lain itu belum mendapat respons positif dari Arab Saudi. Selain karena belum ada regulasi, Saudi juga masih ingin menjaga kuota negara lain yang memiliki hak.

"Mereka juga tidak bisa begitu saja memberikan (kuota itu) kepada Indonesia, karena negara lain tentu meminta perlakuan yang sama dan punya hak yang sama," imbuhnya.

Meski demikian, kata Lukman, pemerintah akan terus berusaha membujuk Arab Saudi agar setidaknya kuota Indonesia tidak berkurang. Dalam hal ini, Kemenag juga meminta bantuan Kementerian Luar Negeri untuk berdiplomasi.

"Tahun ini pemerintah Arab Saudi berjanji menuntaskan renovasi Masjidil Haram sehingga tahun depan kuota jadi normal, tidak kena potongan 20 persen," paparnya. (K24,F4,viva-59)

Berita tanggal 4 September 2016

168 "Haji Filipina" Dipulangkan

Sembilan Masih Ditahan
Pemkab Jepara Siapkan Penjemputan

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberi kepastian, pada Minggu (4/9), 168 dari 177 "haji Filipina" pulang ke Tanah Air. Sementara sembilan orang lainnya belum dapat dipulangkan, tengah menjalani proses investigasi dari otoritas Filipina.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia & Bantuan Hukum Indonesia (PWNI & BHI) Kementerian Luar Negeri LaluM Iqbal mengatakan, *clearance* diberikan setelah KBRI melakukan berbagai upaya termasuk menyampaikan *suplementary guarantte letter* atau semacam surat jaminan.

"Direncanakan kepulangan 168 WNI tersebut dengan pesawat khusus (Air Asia) pada Minggu (4/9), sekitar pukul 13.00 waktu Filipina. Bapak Duta Besar RI di Manila bersama Tim Kemenlu akan langsung mendampingi para WNI dalam penerbangan tersebut," kata Iqbal, Sabtu (3/9).

Pesawat akan terbang dari Manila ke Jakarta melalui Makassar dengan nomor penerbangan XT983 STA. Selanjutnya 100 orang "haji Filipina" yang berasal dari Sulawesi akan diserahterimakan kepada Pemda Sulawesi Selatan di Bandara Hasanudin. Sementara itu untuk 68 WNI akan diserahkan oleh Duta Besar RI untuk Filipina kepada masing-masing pemda.

"Mereka berasal dari Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan DKI," ucap Iqbal.

Mengenai sembilan orang yang masih tertinggal, Kepala Pusat Komunikasi dan Biro Humas Kementerian Agama Syafrizal Sofyan, pihak Filipina sudah melakukan investigasi. Ia belum bisa menjelaskan, apakah kesembilan orang itu berkaitan dengan kasus pemalsuan paspor dengan korban 177 WNI.

(Bersambung hlm 9 kol 6)

Lalu Muhammad Iqbal

SM/dok

168 ...

(Sambungan hlm 1)

"Kami masih menunggu keterangan dari KBRI. Mereka (sembilan orang) belum bisa pulang dulu," ucapnya dalam acara diskusi publik bertajuk "Karut-Marut Penyelenggaraan Haji di Indonesia" di Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Dianggap Mengetahui

Sementara Kasubdit Verifikasi Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Elfinur menambahkan, meski identitas kesembilan WNI itu belum diketahui mereka semua cakap berbahasa Inggris saat memberi keterangan bagi pihak imigrasi Filipina. "Ya mereka orang-orang yang *qualified* untuk memberi informasi-informasi sehubungan penyelidikan kasus ini bagi negara Filipina," kata Elfinur.

Untuk peranan mereka dikatakannya hanya sebagai pemberi informasi tentang masalah pemalsuan paspor tersebut. "Ya intinya kesembilan orang itu dianggap yang lebih tahu tentang masalah keberangkatan ini, makanya masih ditahan," ucapnya.

Informasi kepulangan 177 "haji Filipina" ke Indonesia, juga diketahui Kabag Kesra Setda Jepara Lukito Sudi Asmoro.

"Untuk yang berasal dari Jateng akan diterbangkan ke Bandara Ahmad Yani. Kepastian waktu kami belum tahu. Termasuk nama-nama yang dipulangkan. Tapi kami sudah mengirim utusan ke Jakarta untuk memastikan," jelasnya.

Karena belum ada kepastian, Lukito mengaku hingga kemarin (3/9), pihaknya juga belum memberi tahu kepada pihak keluarga. Informasi pada keluarga akan disampaikan setelah ada kepastian. Jika sudah ada kepastian, Pemkab sendiri akan melalakukan penjemputan di Semarang. "Dari Semarang langsung ke pendapa kabupaten. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga masing-masing," imbuhnya.

Dari pihak keluarga pun belum bisa yakin sepenuhnya. Mereka menunggu kepastian dari pemerintah. "Sampai saat ini (kemarin) belum ada informasi resmi dari pihak berwenang soal kapan bisa dipulangkan. Saya hanya dapat kabar dari salah satu calon jamaah haji melalui pesan singkat," kata Musyafak (44), anak dari Karomisah (63), warga RT 4 RW 1, Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung yang turut ditahan di Filipina.

Pesan singkat yang diterimanya berasal dari Sugipah Zahroh, pembimbing rombongan calon "haji Filipina" asal Jepara. Isi pesan singkat itu yakni sebanyak 168 calon jamaah haji yang sempat ditahan di Filipina akan dipulangkan Minggu (4/9) ini. Sugipah Zahroh sendiri juga ikut ditahan oleh otoritas Filipina.

"Kami senang dengan adanya kabar itu. Terlebih dikabarkan pula semua calon jamaah haji dalam kondisi baik. Saya berharap ada kepastian serta data akurat nama-nama calon jamaah haji yang dipulangkan. Sehingga saya bisa mengetahui Ibu (Karomisah) termasuk yang dipulangkan besok (hari ini-*Red*) atau tidak," paparnya.

Dari Sulawesi Selatan pun, pemda setempat juga tengah mempersiapkan penjemputan di Bandara Hasanuddin.

"Rencananya besok akan tiba di Bandara Internasional Hasanuddin dari Manila, Jakarta dan Makassar. Penerbangan diperkirakan sekitar pukul 10.30 waktu setempat, kami sudah siapkan penjemputan," kata Kepala Humas dan Hukum Angkasa Pura I bandara setempat Turah Ajari. (adp,di,dtc,ant-90)

Berita tanggal 5 September 2016

SM/Dery Ridwansah

TIBA DI TANAH AIR : *Rombongan "haji Filipina", kemarin akhirnya bisa kembali ke Tanah Air. Mereka tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Minggu (4/9), didampingi Duta Besar RI untuk Filipina Johny Lumintang. (95)*

Pulang Tak Bawa Paspor Indonesia

Sindikat Malaysia Terlibat

JAKARTA - Akhirnya 168 orang "haji Filipina", Minggu (4/9), tiba di Tanah Air. Sebanyak 110 orang terlebihdulu mendarat di Bandara Hasanuddin, Makassar, sisanya 58 orang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Duta Besar (Dubes) RI untuk Filipina Johny Lumintang mengatakan, mereka yang pulang ke Tanah Air sudah tidak memiliki paspor Indonesia. Paspor tersebut hilang saat terjadipenukaran denganpaspor Filipina.

"Paspor Filipina sudah pasti ditahan (aparat Flipina), paspor Indonesia tidak tahu di mana.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Pulang...

(Sambungan hlm 1)

Hilang dibawa sindikat ini, saat mereka minta paspor Indonesia ditukar dengan paspor Filipina saat antre di Imigrasi. Yang jelas 177 WNI kita punya paspor Indonesia untuk bisa masuk Filipina," kata dia.

Dari 110 orang itu berasal dari Sulawesi Selatan (94 orang), Kalimantan Timur (15 orang), dan seorang dari Sulawesi Barat. Sedangkan 58 orang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.

Rombongan dari Jawa Tengah, ada satu orang yang ditahan di Filipina. Dengan demikian terdata ada 18 orang yang bisa pulang.

Kemarin, langsung dilakukan serah terima 168 WNI dari Dubes RI di Filipina selaku wakil pemerintah kepada perwakilan pemda asal 168 WNI tersebut di Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu M Iqbal menyebutkan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Filipina Johny Lumintang ikut mendampingi mereka. "Mereka tiba pukul 14.15 WIB bersama Pak Dubes (Johny Lumintang). Tapi mereka tidak ingin diekspose, makanya tidak kami hadirkan," lanjutnya.

Menurut Johny, hilangnya paspor tidak bisa dianggap sepele. Johny khawatir paspor tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin masuk Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan Filipina guna membongkar kasus tersebut.

Terkait nasib sembilan WNI yang masih tertahan, Pejabat Fungsional Kemenlu RI Bunyan Saptomo belum bisa mengetahui kapan mereka bisa pulang. Pemerintah Filipina merasa masih memerlukan keterangan mereka, untuk dapat membongkar secara utuh sindikat tersebut.

"Diduga mereka terlibat sebagai pihak yang ingin memberangkatkan calon haji asal Indonesia lewat Filipina. Pemerintah Filipina ingin mengetahui siapa pihak-pihak di Filipina yang terlibat. Meski demikian kami komitmen untuk memberi perlindungan pada mereka, sedang dibicarakan oleh Dubes untuk pemulangannya," ucapnya.

Tak Manusiawi

Selama di Filipina, kondisi 177 WNI diungkapkan Johny Lumintang, ternyata sempat menyedihkan. Perlakuan otoritas Filipina tidak manusiawi. Dirinya melihat langsung kondisi mereka dalam tahanan imigrasi. Hal tersebut mendorong dirinya untuk melobi otoritas Filipina, agar boleh memindahkan 177 WNI tersebut ke KBRI di Manila.

"Semisalnya kamu bersama 15 orang ditempatkan di ruangan kecil, sempit dengan satu toilet, (apa-red) manusiawi?" kata Johny.

Walaupun otoritas Filipina setuju pemindahan, lanjut dia, ternyata prosesnya tidaksemudah yang dibayangkan.

"Saya katakan,mereka ini bukan pelaku kriminal, mereka ini adalah korban. Kemudian Pemerintah Filipinamenyatakan bisa dipindahkan, Mereka baru bisa pindah itu, Kamis (23/8), pukul 24.00.Padahal saya sudah ngomongnya sejak Minggu," tutur Johny.

Dalam kesempatan terpisah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah mendapatkan sejumlah nama yang merupakan tersangka dari kasus penipuan dengan korban ratusan WNI calon haji yang berangkat melalui Filipina.

Nama-nama calon tersangka tersebut didapat setelah tim mabes Polri menggali keterangan secara intensif kepada para korban saat berada di KBRI Manila.

"Di Kedutaan sebagian besar sudah di-*interview* oleh tim Mabes Polri. Kami lakukan *interview* secara intensif. Sehingga, kami sudah mendapatkan nama-nama siapa yang mengirimkan mereka. Nanti pasti akan kami umumkan. Sudah di kantong. Jadi tinggal diumumkan ," kata Tito usai menghadiri acara Organisasi Aksi Solidaritas Era (Oase) bertema "Keluarga Indonesia Menolak Narkoba, Pornografi, dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", di Bundaran HI, Jakarta Pusat, kemarin.

Kapolri menambahkan dalam kasus tersebut, selain melibatkan warga negara Filipina juga ada keterlibatan warga negara Malaysia. Maka saat ini masih ada tim Polri yang berada di Filipina untuk mengusut kasus tersebut, selain tim yang ini bergerak ke daerah-daerahasal 177calonhajiyanggagal berangkat tersebut.

Sementara Pemprov Jateng turut menjemput kepulangan "haji Filipina". Kepala Biro Humas Pemprov Jateng Sinung N Rachmadi mengatakan,sesuairencana pada Senin (5/9), sudah tiba diSemarang. Dari 18 orang itu 14 orang dari Jepara, dua orang dari Blora dan dua orang lagi dari Grobogan. Semuanya dalam keadaan sehat. Mereka diterima oleh Plh Asisten Kesra Nunuk Hardiati, Kepala Biro Sosial, Kepala Biro Bintal dan Kepala Kantor Perwakilan Pemprov Jateng di Jakarta.

"Penjemputan dipusatkan di Semarang. Mereka akan istirahat terlebih dulu di Wisma Perdamaian. Sambil menunggu pihak keluarga atau perwakilan pemerintah kabupaten setempat untuk menjemput," ucap Sinung.

Sementara itu, rombongan Pemkab Jepara yang dipimpin Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan Kabag Kesra Lukito Sudi Asmoro akan mendampingi "haji Filipina" di Wisma Perdamaian.

"Rencana rombongan akan diterima oleh Gubernur Jateng di Wisma Perdamaian. Selanjutnya rombongan asal Jepara akan dijemput oleh bus Pemkab," terang Lukito. (F4,H81,adp,kar,ant-90)

6 September 2016

Seorang Calon Haji Masih di Filipina

Uang Dijanjikan Kembali Utuh

SEMARANG - Sebanyak 18 dari 19 calon haji asal Jateng berpaspor Filipina tiba di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Senin (5/9) pukul 04.15. Seorang lainnya masih berada di Filipina untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Meski telah disediakan tempat istirahat dan makan pagi, ke-18 orang yang gagal berangkat ke Tanah Suci itu memilih pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka terdiri atas 14 warga Kabupaten Jepara, dua warga Blora, dan dua dari Grobogan.

"Satu orang masih menjadi saksi, karena dia yang fasih berbahasa sana. Dia tinggal di kedutaan dan kondisinya sehat. Delapan belas orang yang pulang juga sehat," kata Plh Asisten Kesra Pemprov Jateng

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Seorang...

(Sambungan Hal 1)

Nunuk Hardiyani di Wisma Perdamaian, Senin (5/9).

Soal kapan WNI yang masih berada di Filipina itu akan dipulangkan, Nunuk belum tahu pasti. Namun, kedutaan memberi informasi, yang bersangkutan akan pulang secepatnya setelah data dan keterangan saksi dianggap cukup.

Nunuk menjelaskan, sebelum para calon haji tiba di Wisma Perdamaian, keluarga dan perwakilan pemkab sudah menunggu. Begitu sampai, 18 orang itu lagsung masuk mobil penjemput dan kembali ke daerah mereka.

"Meski ada keluarga, mereka kami serahkan pada perwakilan pemkab. Selanjutnya menjadi kewajiban pemkab," lanjut dia.

Ia enggan membeberkan identitas para calon haji demi menjaga kondisi psikis mereka.

Kepala Biro Humas Pemprov Jateng Sinung N Rachmadi mengatakan, atas kejadian ini, Pemprov akan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mengevaluasi seluruh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Jika perlu, akan dibuat daftar KBIH resmi dan *call center* yang menjadi rujukan calon haji.

"Tak perlu menyalahkan calon haji. Mereka korban. Ke depan, kami akan lebih aktif menyosialisasikan pada calon haji agar memilih KBIH resmi," terang Sinung.

Menolak Dijemput

Dari Jepara dilaporkan, 14 warga yang sempat ditahan otoritas Filipina sudah sampai di rumah masing-masing. Sementara itu, menurut informasi, keluarga calon haji menerima pesan singkat dari seseorang bernama Sugipah Zahroh yang mengaku sebagai pembimbing "haji Filipina" asal Jepara.

Pesan singkat itu berbunyi, uang calon haji akan dikembalikan utuh. Namun, kebenaran informasi itu belum dapat dikonfirmasi.

Ketika sampai di Wisma Perdamaian, keluarga ke-14 warga Jepara itu menolak dijemput Pemkab Jepara yang berencana membawa dan menurunkan mereka di pendapa kabupaten.

"Alasannya malu, sehingga mereka tidak jadi dikumpulkan di pendapa," ungkap Kepala Bagian Kesra Setda Jepara Lukito Sudi Asmara.

Ia menjelaskan, 14 orang itu dipulangkan dari Jakarta pada Minggu (4/9) sore, kemudian naik bus dan sampai di Semarang pada Senin (5/9) subuh. Di Wisma Perdamaian, mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing.

Lukito berharap masyarakat tidak menambah beban para calon haji yang gagal berangkat tersebut. Sebab, selain dikabarkan diperlakukan tidak manusiawi di Filipina, mereka juga menanggung malu karena batal berhaji. (H81,J8,adp-59)

10 September 2016

Tujuh Pemilik Biro Haji Tersangka

JAKARTA - Polisi menetapkan tujuh tersangka dalam kasus pemberangkatan 177 calon haji asal Indonesia ke Tanah Suci secara ilegal melalui Filipina.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, ketujuh tersangka yang berasal dari lima biro perjalanan haji itu tengah menjalani proses hukum atas lima laporan yang diterima polisi.

Berdasarkan laporan polisi tanggal 22 Agustus 2016, polisi menetapkan dua tersangka, yakni AS dan BDMW, pemilik biro perjalanan PT Ramana Tour.

Kejahatan kedua tersangka menyebabkan 38 orang menjadi korban, yang terdiri atas 19 orang asal Jepara, 12 warga Pasuruan, dua orang dari Jambi, dan tiga warga Bogor. "Kerugian mencapai Rp 3,5 miliar," katanya di Mabes Polri, Jumat (9/9).

Selanjutnya, berdasarkan laporan kedua tanggal 2 September 2016, polisi menetapkan tersangka MNA yang merekrut 65 calon haji dan menimbulkan kerugian Rp 6,3 miliar.

Polisi juga menetapkan tersangka MT, yang merekrut para calon haji dari Kabupaten Barru, Sulawesi, berdasarkan laporan tanggal 2 September. "Korban MT 21 orang, kerugian Rp 3,2 miliar," jelas Boy.

Kemudian, berdasarkan laporan keempat tanggal 2 September, polisi menetapkan F alias A dan AH sebagai tersangka.

(Bersambung hlm 2 kol 1)

Tujuh....

(Sambungan hlm 1)

Mereka adalah pemimpin biro perjalanan PT Shafwah yang merekrut 24 calon haji dan menyebabkan kerugian Rp 3 miliar. Terakhir, berdasarkan laporan kelima tanggal 2 September, polisi menetapkan ZAP sebagai tersangka.

Dia adalah salah satu pimpinan PT Hade El Badr Tour yang merekrut 12 calhaj dan menyebabkan kerugian Rp 2 miliar.

Menurut Boy, di antara ketujuh tersangka tersebut ada yang berperan sebagai perekrut jamaah dan penerima uang biaya haji. Polisi menjerat ketujuh tersangka dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 64 dan 63 UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Lolos ke Saudi

Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri tengah melacak 500-700 calon haji yang lolos berangkat ke Arab Saudi lewat Filipina. Menlu Retno L Marsudi mengatakan, pihaknya masih mendalami dan mendata para calon haji yang memegang paspor Filipina tersebut. "Semua informasi sedang kami kumpulkan dan dalami," ungkapnya.

Menurut dia, Kemenlu sudah berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan Filipina. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhamad Iqbal menambahkan, jajarannya juga berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Kementerian Agama, pemda asal para calon haji, imigrasi, dan Polri.

Soal kelolosan 500-700 calon haji ke Saudi itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (7/9).

Menurut dia, Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersedia membantu pemerintah Indonesia dalam pemulangan jamaah yang kini masih menjalankan ibadah haji tersebut.

"Bapak Presiden (Jokowi) dan Presiden Duterte menyetujui bahwa mereka tidak perlu diarahkan ke Filipina, nanti akan diarahkan (dipulangkan) langsung ke Indonesia," terang Yason-

na.

Sementara itu, dari Arab Saudi dilaporkan, 191 WNI ditahan dalam penggerebekan di pintu masuk menuju Makkah. Banyak di antaranya adalah ''haji *backpacker*'' dan penjual makanan.

''Kejadiannya dua hari yang lalu. Aparat Arab Saudi mencegah WN asing yang melaksanakan haji tanpa surat izin, paspor, dan sebagainya,'' kata *acting* Konjen RI di Jeddah, Dicky Yunus, Jumat.

Dalam razia tersebut, 221 orang ditahan, 191 di antaranya WNI yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dewasa serta sejumlah anak-anak.

Dicky mengatakan bahwa sebagian dari mereka hendak menunaikan ibadah haji namun tidak menggunakan paspor haji. Mereka masuk dari jalur-jalur perbukitan alias haji *backpacker*. ''Sudah sejak lama diwanti-wanti mengurus paspor haji melalui travel, demi kemudahan dan keselamatan, tidak telantar, serta konsumsi dan transportasi terakomodasi. Banyak warga negara asing di sini yang juga haji *backpacker*, masuk melalui bukit-bukit yang dianggap aman untuk bisa masuk ke Makkah. Petugas keamanan Saudi kini disebar untuk mencegah masuknya haji ilegal ke wilayah Masjidil Haram dan sekitarnya,'' imbuhnya.

Hingga kemarin KJRI Jeddah belum diizinkan untuk berhubungan dengan WNI yang menjadi tahanan imigrasi Saudi tersebut.

Selama September 2016 ini, imbuh dia, sudah 486 WNI ditahan imigrasi Arab Saudi. (ant,-dtc-59)

Berita tanggal 13 September 2016

Polri-Filipina Bidik Kasus ''Haji Filipina''

Indonesia Incar Kuota Negara Asia

JAKARTA - Polri dan Kepolisian Filipina tengah menangani perkara ''haji Filipina''. Ada 700-800 jamaah haji Indonesia melalui Filipina yang saat ini tengah terjerat kasus keimigrasian di Arab Saudi.

Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan, Polri dan Kepolisian Filipina sepakat untuk menangani bersama. ''Penanganannya bareng-bareng,'' ucap dia di Mabes Polri, Senin (12/9).

Dia menjelaskan, fokus penanganan untuk perkara 177 jamaah ''haji Filipna'' dengan tujuh tersangka. Selanjutnya, Polri akan mengembangkan perkara tersebut.

Dia menegaskan jamaah ''haji Filipina'' tersebut adalah korban. Adapun aktor intelektualnya masih dalam penyelidikan.

Diduga ada jaringan internasional yang memanfatakan kuota haji yang tak sebanding dengan calon haji Indonesia yang mengakibatkan daftar tunggu yang sangat lama, bisa mencapai belasan tahun.

''Pelakunya dari berbagai negara. Untuk saat ini, ada satu tersangka yang mempunyai dua paspor, Filipina dan Malaysia.''

Seperti diketahui, Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat berkunjung ke Jakarta juga membicarakan perkara tersebut dengan Presiden Joko Widodo, Jumat (9/9).

Sementara Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Enam orang tersangka tersebut merupakan pemilik dan penanggung jawab agen perjalanan. Adapun satu tersangka lainnya yang mempunyai paspor Filipina dan Malayasia itu masih di Filipina.

Cara Terbaik

Saat di Serang, Banteng, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha menyelesaikannya dengan cara yang terbaik.

''Saya sudah sampaikan ke Presiden (Filipina) Duterte mengenai 700-800 yang sudah terlanjur di Arab Saudi, ini juga akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya antara Indonesia dan Filipina,'' kata Presiden.

Pada saat bertemu Duterte, dirinya mendapat respons positif. Presiden Duterte bisa memahami dan membantu penyelesaian 700-800 WNI yang terlanjur naik haji dengan paspor Filipina. Selain itu bersedia memberikan kuota haji Filipina yang masih tersisa.

Namun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penambahan kuota tersebut akan menggunakan prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.

Bahkan saat perhelatan KTT G20, pertemuan dengan wakil pemerintah Arab Saudi Prince Mohammed, Presiden minta penambahan kuota untuk Indonesia.

Selain itu Presiden Jokowi juga telah meminta tambahan kuota dari negara-negara yang masih memiliki kelebihan kuota jamaah haji. ''Kuota yang diberikan Filipina, Singapura, Jepang yang tidak terpakai, akan kami pakai semuanya,'' kata Presiden

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia berpeluang menggunakan kuota haji negara lain. Termasuk bisa menggunakan kuota dari negara dengan umat Islam minoritas, seperti di Filipina, Thailand, Vietnam, dan Laos.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sudah saatnya pemotongan haji 20 persen dihentikan karena pembangunan di sekitar kakbah sudah selesai.(K24,F4,J13-90)

Berita tanggal 14 September 2016

Calon Haji Ilegal Dicekal 10 Tahun

Tersangka Agen Filipina Bertambah

JAKARTA - 147 dari 229 calon haji ilegal yang ditangkap dan ditahan otoritas keamanan Arab Saudi, dijatuhi sanksi berupa deportasi dan dicekal masuk ke negara itu hingga 10 tahun ke depan.

Pelarangan itu terkait berbagai tujuan, termasuk umroh dan ibadah haji. "Mereka akan dideportasi dan tidak boleh ke Arab Saudi selama 10 tahun, termasuk menunaikan ibadah haji dan berkunjung ke sana," ujar Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/9)

Mereka terdiri atas 130 perempuan dan 14 laki-laki. Tiga orang lainnya masih dalam investigasi. "Apakah masalahnya di imigrasi saja atau ada tindak pidana lain, masih diselidiki. Kalau hanya imigrasi, mereka bisa dideportasi. Kalau ada yang lain, proses hukumnya nanti

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Lalu M Iqbal

SM/dok

Calon....

(Sambungan hlm 1)

di sana," kata Iqbal.

Sanksi itu, menurut Iqbal, merupakan kelanjutan dari penahanan terhadap 229 WNI di Makkah yang ditangkap karena menjalankan ibadah haji tanpa izin. Dari 229 WNI tersebut, 147 di antaranya sudah diproses dan mendapatkan sanksi pencekalan tersebut.

Berdasar informasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, sebagian besar WNI yang ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi itu bermasalah karena izin tinggal mereka telah kedaluwarsa. Modusnya, mereka masuk Arab Saudi untuk umroh, namun setelah selesai tidak pulang.

Mereka tinggal sembunyi-sembunyi di penampungan sampai *overstay*. Hal itu mereka lakukan agar bisa sekalian naik haji. Namun cara mereka melanggar hukum Arab Saudi.

Sebagaimana diberitakan, 229 WNI ditangkap di dua penampungan calon haji di Makkah menjelang wukuf di Arofah. Mereka tidak memiliki izin beribadah haji dan diduga membayar sejumlah uang kepada sindikat penyedia jasa perjalanan haji ilegal.

Sementara itu, Bareskrim Polri terus menelusuri kasus 177 WNI yang diberangkatkan haji lewat Filipina. Tersangka kasus itu kini bertambah jadi 8 orang.

Tersangka tambahan tersebut berinisial HR. Dia merupakan aktor intelektual kasus penipuan 177 WNI yang berangkat haji lewat Filipina. HR menyediakan izin keberangkatan di Filipina untuk digunakan berangkat ke Jeddah.

Siapkan Fasilitas

"HR yang menyediakan dan menyiapkan fasilitas izin di Filipina," kata Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

HR yang memegang paspor Filipina dan Malaysia itu juga telah berstatus tersangka dan ditahan Kepolisian Filipina terkait kasus ini.

Karena itu, Indonesia akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memeriksa HR.

"Kami pakai *mutual legal assistance* (MLA). Jadi kerja sama dengan Kemenlu kemudian kami difasilitasi untuk mendapat keterangan HR di Filipina. Nanti berita acaranya untuk melengkapi kesaksian tersangka-tersangka yang ada di sini," ujarnya.

Soal proses hukum di Indonesia, kemungkinan bisa dilakukan setelah proses hukum di Filipina rampung.

Ari mengatakan, kecil kemungkinan HR bisa dibawa ke Indonesia dalam waktu dekat. Sebab, HR masih mempertanggungjawabkan perbuatannya di Filipina. "Yang memungkinkan, kami meminta HR dideportasi supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di Indonesia," tandasnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar sebelumnya mengatakan, inisial tujuh tersangka lain adalah HAS, BMDW, MAN, HMT, HF alias A, HAH alias A, dan ZAP. Penyidik akan segera memanggil mereka untuk dimintai keterangan.

Boy menambahkan, para tersangka dijerat tiga pasal berlapis, yaitu Pasal 62 UU No 8 Tahun 1999 tentang UU Perlindungan Konsumen, Pasal 64 dan 63 UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan. "Ancamannya 12 tahun penjara," tandasnya. (F4,dtc-61)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

1. Nama : Sholeh
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 11 November 1989
3. NIM : 131211081
4. Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
5. Semester : VIII (Genap)
6. Tahun Ajaran : 2016/2017
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Agama : Islam
9. Status Perkawinan : Belum Menikah
10. Pekerjaan : Mahasiswa
11. Alamat : Dk. Lutung Mati, Rt/Rw 02/04, Ds. Yosorejo, Kec.Gringsing, Kab. Batang-Jawa Tengah.
12. Riwayat Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah 1996-2003, Madrasah Tsanawiyah 2003-2006, Sekolah Menegah Atas 2006-2009.
13. Riwayat Pekerjaan : -